



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TOTO DESANTO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **71754**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **467.142.500**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m²/150 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 292.215.000
2. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 41.525.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m²/50 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 133.402.500

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **161.250.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.250.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SPM/SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU TERIOS SUV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **35.430.000**

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **38.841.233**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **702.663.733**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 702.663.733

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.